



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 81/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **13:17** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Sefriths Eduard Dener Nau sebagai Pemohon I; 2. Misban Ratmaji sebagai Pemohon II; dan 3. Kardinal sebagai Pemohon III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2023 memberi kuasa kepada Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Jumat** tanggal **empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **14:42** WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 81/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : 1. Sefriths Eduard Dener Nau sebagai Pemohon I; 2. Misban Ratmaji sebagai Pemohon II; dan 3. Kardinal sebagai Pemohon III

Pokok Permohonan : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No APPP : 81/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
4	Alat Bukti	1	
5	Surat Kuasa	1	
6	SK Pengangkatan NTT	1	
7	SK Riau	1	
8	Surat Ke Mendagri	1	
9	Surat Ke Sekretariat Negara	1	
10	SK NTB	1	
11	Permohonan tanggal 24 Juli 2023	1 rangkap	Asli
12	Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023	1 rangkap	Asli
13	KTP para Pemohon, serta KTA dan BAS para Kuasa Hukum	1 rangkap	Copy
14	Daftar Bukti Surat tanggal 3 Agustus 2023 untuk Bukti P-01 sd P-14	1 rangkap	Asli
15	Bukti P-01 sd P-14	1 rangkap	Asli
16	Softcopy Permohonan, DAB, SKK, KTP Identitas para Pemohon dan Kuasa Hukum, Alat Bukti (belum leges meterai)	1 folder	Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk

Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.